



APLIKASI PENAGIHAN PAJAK TERHUTANG (SPPT) MASYARAKAT BERBASIS ANDROID

Lailatul Jannah¹, Moh.Anshori Aris Widya²

^{1,2} Program Studi Informatika, Universitas KH. A.Wahab Hasbullah

Article Info:

Dikirim: 17 Juli 2021

Direvisi: 23 Desember 2021

Diterima: 25 Desember 2021

Tersedia Online: 30 Desember 2021

Penulis Korespondensi:

Lailatul Jannah,

Universitas KH. A.Wahab Hasbullah,
Jombang, Indonesia

Email:

laelatuljannah.bim.aks@gmail.com

Abstrak: *Pengelolaan PBB dalam pajak daerah telah diatur dalam UU Nomor 28 pada Tahun 2009 yaitu tentang Retribusi dan Pajak Daerah. Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, memiliki system manual dimana salah satunya pada system pajak yaitu penagihan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang masih menggunakan kertas untuk dokumentasi tagihan pajak oleh wajib pajak. Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto terus meningkatkan kualitas pelayanannya agar terciptanya layanan umum yang baik salah satunya Wajib Pajak. Dalam hal tersebut, Desa Sumbermulyo untuk mempermudah pelayanan dalam pembayaran pajak telah membuat terobosan baru dimana petugas penagihan pajak tidak perlu membawa kertas surat tagihan pajak. Wajib Pajak pada sistem tersebut dapat membayar pajak dengan mudah melalui sistem online yang digunakan oleh petugas penagihan pajak untuk membayar pajak. Metode yang dilakukan untuk Analisis data dan rancang bangun aplikasi ini adalah R&D (Research and Development). Aplikasi e-simpat dibuat dalam sistem operasi android. Aplikasi ini berupa data tagihan wajib pajak terhutang, yaitu wajib pajak untuk orang pribadi dan badan usaha suatu perusahaan.*

Kata kunci: *PBB; sumbermulyo; research and development.*

Abstract: *The management of PBB in regional taxes has been regulated in Law Number 28 of 2009 concerning Levies and Regional Taxes. Sumbermulyo Village, Jogoroto District, Jombang Regency, has a manual system where one of them is in the tax system, namely the collection of Tax Returns Payable (SPPT) which still uses paper to document tax bills by taxpayers. Sumbermulyo Village, Jogoroto District, continues to improve the quality of its services in order to create good public services, one of which is taxpayers. In this case, Sumbermulyo Village to facilitate services in paying taxes has made a new breakthrough where tax collection officers do not need to carry tax invoices. Taxpayers in this system can pay taxes easily through the online system used by tax collection officers to pay taxes. The method used for data analysis and design of this application is R&D (Research and Development). The e-Simpat application on Android is made in the latest operating system. This application is in the form of billing data for taxpayers owed, namely taxpayers for individuals and business entities of a company.*

Keywords: *PBB; sumbermulyo; research and development.*

1. PENDAHULUAN

Tata Cara Perpajakan dan Ketentuan Umum diubah terakhir pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang tertuang dalam pasal ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak yaitu kontribusi yang bersifat wajib yang terutang kepada negara bersifat memaksa oleh wajib pajak pribadi dan badan usaha menurut Undang-Undang yang berlaku.[1]

Jenis pajak di Indonesia yang di terapkan ada beberapa, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut Suandy (2002), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara dimana sebagian besar penggunaannya adalah pada pendapatan daerah yang salah satunya untuk pengadaan sarana prasarana yang juga digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah. PBB memiliki peranan yang penting dalam hal pengadaan pembangunan, hal tersebut dikarenakan pajak ini didistribusikan ke daerah untuk pembangunan daerah otonom yang cukup besar. Pengembangan Pajak Bumi dan atau Bangunan (PBB) sebagai pajak daerah dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan terbitnya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB-P2 (PBB sektor perkotaan dan perdesaan) dimutasikan menjadi pajak daerah, dan PBB-P3 (PBB sektor perhutanan, perkebunan, dan pertambangan) merupakan pajak pusat. Terhitung semenjak 01/01/2014, semua wilayah harus menjalankan PBB-P2. Oleh karena itu, semua wilayah juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan. Penerimaan PBB-P2 dengan adanya pemutasihan ini akan masuk seluruhnya di pemerintah kabupaten dan atau kota, serta diharapkan mampu meningkatkan nilai Pendapatan Asli Daerah. [2]

Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, memiliki system manual dimana salah satunya pada system pajak yaitu penagihan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang masih menggunakan kertas untuk dokumentasi tagihan pajak oleh wajib pajak. Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto terus meningkatkan kualitas pelayanan, agar terciptanya layanan umum yang baik salah satunya Wajib Pajak. Untuk mencapai hal tersebut, Desa Sumbermulyo membuat pintasan baru guna mempermudah pembayaran pajak dimana petugas penagihan pajak tidak perlu membawa kertas surat tagihan pajak. Pada Aplikasi tersebut mempermudah Wajib Pajak untuk membayar pajak melalui sistem online yang digunakan oleh petugas penagihan pajak. [1]

Aplikasi e - simapat menampilkan data tagihan pajak dari wajib pajak untuk mengganti system manual berupa kertas menjadi system android. Fitur- fitur pada aplikasi e - simapat hanya menampilkan data tagihan pajak menggunakan kode berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan atau Nomor Kartu Keluarga (KK). Aplikasi e - simapat dibuat dalam sistem operasi android. Aplikasi ini berupa data Tagihan wajib pajak terhutang, baik orang pribadi dan badan usaha suatu perusahaan. [3]

2. METODOLOGI PENELITIAN

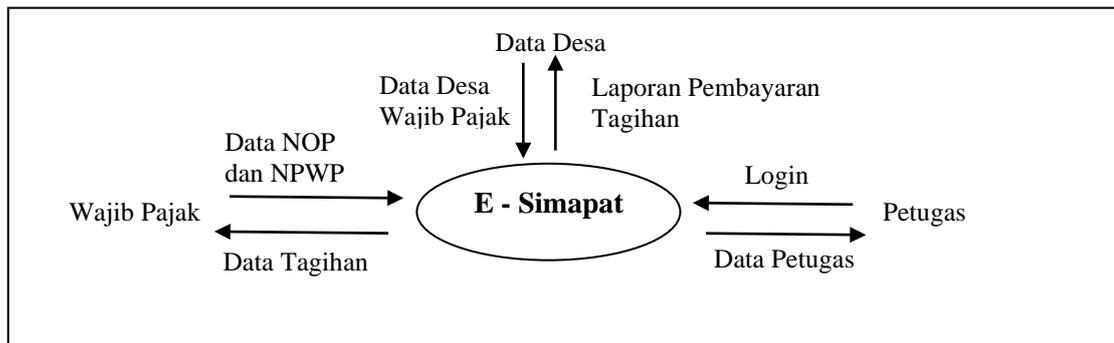
Metode yang dilakukan untuk Analisis data dan pembuatan aplikasi ini yaitu R & D (Research and Development) digunakan dalam riset untuk bangun rancang system, mengumpulkan data / informasi, Menyusun rencana penelitian, dan melakukan percobaan pada program dalam skala yang terbatas. [4]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk yang berupa aplikasi berbasis android merupakan hasil yang telah dicapai dalam pembuatan suatu project. Aplikasi e - simapat menampilkan data tagihan pajak oleh wajib pajak untuk mengganti system manual berupa kertas menjadi system android. Fitur- fitur pada aplikasi e - simapat menampilkan data tagihan pajak menggunakan kode berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan atau Nomor Kartu Keluarga (KK). Aplikasi ini berupa data tagihan wajib pajak terhutang, dari wajib pajak pribadi dan atau badan usaha suatu perusahaan.[3]

3.1 Desain Use Case

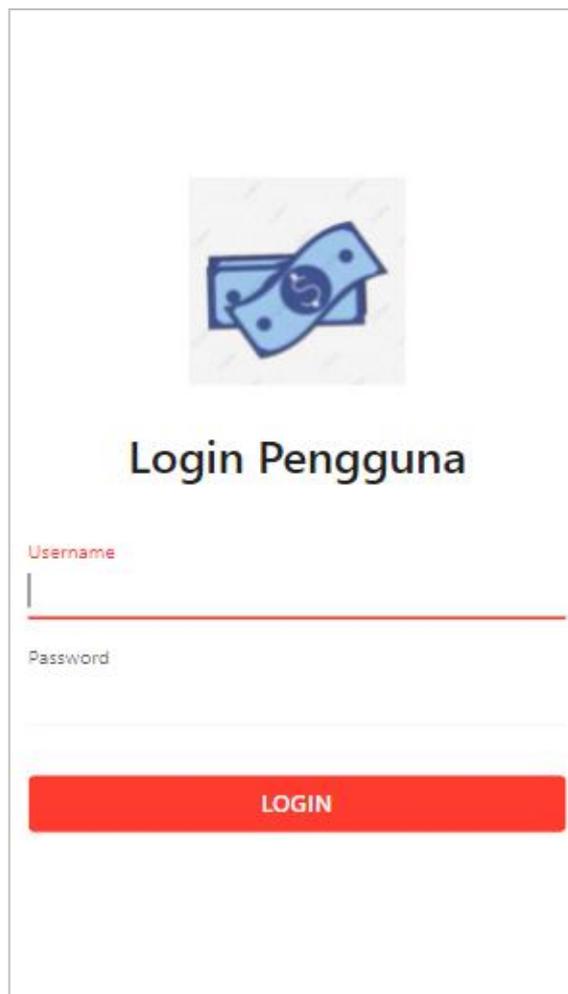
Adapun Desain Use Case system aplikasi E – simapat :



Gambar 1. Desain Use Case

3.2 Implementasi

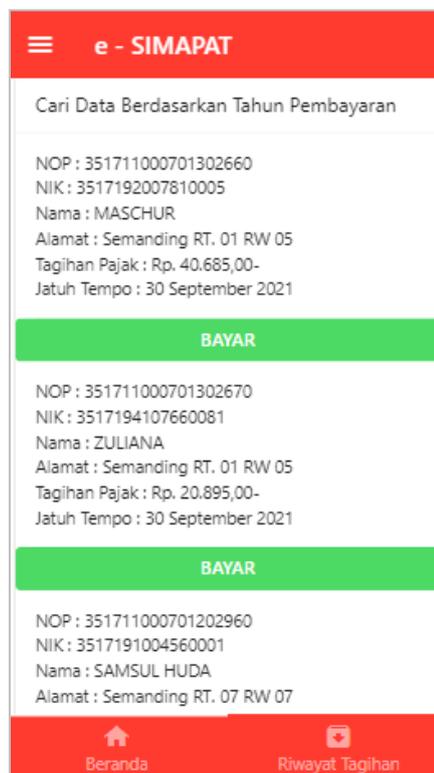
Aplikasi ini di buat berbasis android dengan menginduk pada website di kantor desa sumbermulyo kecamatan jogoroto kabupaten jombang.(<https://sumbermulyo-jombang.desa.id>) Selain itu, terdapat interface dari Aplikasi E-simapat sebagai penghubung dengan web sistem, beberapa contoh interface yaitu pada gambar 2 ada halaman login, pada gambar 3 ada halaman menu beranda, pada gambar 4 ada halaman data tagihan wajib pajak, pada gambar 5 ada halaman bayar pajak, dan pada gambar 6 ada halaman Riwayat tagihan. [5]



Gambar 2. Halaman Login



Gambar 3. Halaman Menu Beranda



Gambar 4. Halaman Data Tagihan Wajib Pajak



Gambar 5. Halaman Bayar Pajak



Gambar 6. Halaman Riwayat Tagihan

4. KESIMPULAN

Dalam menjawab tantangan di masyarakat, penelitian ini telah membuat aplikasi E – simapat yang berbasis android dan diintegrasikan dengan website kantor desa sumbermulyo kecamatan jogoroto kabupaten jombang. pada uji coba program dapat disimpulkan bahwa aplikasi dapat terhubung dengan sistem informasi website dan bisa terhubung dengan sistem yang terdapat di kantor desa dengan baik.[5]

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Bandiyono and B. F. Septiana, “Pelaksanaan E-Billing Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak,” *J. Kebijak. Publik*, vol. 9, no. 1, pp. 19–26, 2018.
- [2] N. K. E. S. Dewi, I. P. G. Diatmika, and I. N. P. Yasa, “Pengaruh Pemerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pendapatan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pendesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kabupaten Buleleng,” *e-Journal SI Ak Univ. Pendidik. Ganesha*, vol. 8, no. 2, 2017, [Online]. Available: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/13651/8506>.
- [3] D. Maulana, I. Armida, P. Aji, S. D. Budiwati, F. I. Terapan, and U. Telkom, “Aplikasi Panduan Pembayaran Pajak Kendaraan Berbasis Android,” *eProceedings Appl. Sci.*, vol. 2, no. 1, pp. 122–131, 2016, [Online]. Available: <https://libraryproceeding.telkomuniversity.ac.id/index.php/appliedscience/article/viewFile/4053/3828>.
- [4] M. S. Rumetna *et al.*, “Rancang bangun aplikasi koperasi simpan pinjam menggunakan metode research and development,” vol. 11, no. 1, pp. 119–128, 2020.
- [5] D. Informasi, U. Penelitian, and D. Berbasis, “Jurnal sistem informasi dan tenologi,” pp. 1–6, 2018.